UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Reformulasi Pengaturan Keberlanjutan Kepengurusan Organisasi Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum
dan Keberlangsungan Fungsi Organisasi**
Herman Budi Leksono, Dr. Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Anand, Ghansham. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Arry Supranto, dkk. 2009. *Jati Diri Notaris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press.

Atmadja, Arifin P. Soeria. 2005. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik. Jakarta*: Badan Penerbit Universitas Indonesia.

Ayres, Ian, dan John Braithwaite. 1992. R*esponsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate*. New York: Oxford University Press.

Barnard, Chester I. 1938. *The Functions of the Executive*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Beetham, David. 1991. *The Legitimation of Power*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Macmillan Education Ltd.

Brody, Susan L., Jane Rutherford, Laurel A. Vietzen, dan John C. Dernbach. 1994. *Legal Drafting*. New York: Aspen Publishers.

Campbell, Tom D. 1996. *The Legal Theory of Ethical Positivism*. London dan New York: Routledge.

Cowan, David, dan Daniel Wincott. 2016. *Exploring the 'Legal' in Socio-Legal Studies. London*: Palgrave Macmillan.

Emilio Díez-de-Castro dan Marta Peris-Ortiz (eds.). 2018. *Organizational Legitimacy: Challenges and Opportunities for Businesses and Institutions*. Cham: Springer International Publishing.

Freidson, Eliot. 2001. *Professionalism: The Third Logic*. Cambridge: Polity Press.

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Reformulasi Pengaturan Keberlanjutan Kepengurusan Organisasi Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum
dan Keberlangsungan Fungsi Organisasi**
Herman Budi Leksono, Dr. Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Hadjon, Philipus M., R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M. ten Berge, P.J.J. van Buuren, dan F.A.M. Stroink. 2023. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.* Cetakan ke-15. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hansmann, Henry B. 1996. *The Ownership of Enterprise*. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.

Isomura, Kazuhito. 2021. *Management Theory by Chester Barnard: An Introduction*. Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd.

Kelsen, Hans. 1967. *Pure Theory of Law*. Diterjemahkan oleh Max Knight. Berkeley dan Los Angeles: University of California Press.

Maxeiner, James R. 2007. *Legal Certainty: A European Alternative to American Legal Indeterminacy*. Oxford: Oxford University Press.

Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar.* Yogyakarta: Liberty.

Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy O.S. Hiariej. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 2008. *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia: Jati Diri Notaris Indonesia: Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Raitio, Juha. 2003. *The Principle of Legal Certainty in EC Law. Law and Philosophy Library*, Vol. 64. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Rawls, John. 1999. *A Theory of Justice*. Revised Edition. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.

Ridwan HR. 2003. *Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta*: UII Press.

Ridwan Khairandy. 2009. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Soekanto, Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sumarja, FX. 2015. *Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing: Tinjauan Politik Hukum dan Perlindungan Warga Negara Indonesia*. Yogyakarta: STPN Press.

Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Reformulasi Pengaturan Keberlanjutan Kepengurusan Organisasi Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum
dan Keberlangsungan Fungsi Organisasi**
Herman Budi Leksono, Dr. Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Tjandra, W. Riawan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel Jurnal

Blore, Kent. 2024. "*The First 'Caretaker' Government*." Australasian Parliamentary Review, Vol. 39, No. 2.

Boston, Jonathan, Stephen Levine, Elizabeth McLeay, Nigel S. Roberts, dan Hannah Schmidt. 1998. "*Caretaker Government and the Evolution of Caretaker Conventions in New Zealand*." Victoria University of Wellington Law Review, Vol. 28, No. 4.

Hansmann, Henry B. 1980. "*The Role of Nonprofit Enterprise*." The Yale Law Journal, Vol. 89, No. 5.

Marjosola, Heikki. 2026. "*Legitimating Corporate Power: Shareholderism versus Stakeholderism*." Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 46, No. 1.

Rahmi, Elita, Diana Amir, Afrizal Nehemia Toscany, Rts. Fanny Inayah, dan Rifqi Pratama Putra. 2026. "*The Crossroad of Notary Organizations in Indonesia: Is There Any Government Guidance and Supervision*." Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi (JAPHTN-HAN), Vol. 5, No. 1.

Samuel. 2021. "*Kewenangan Pelaksanaan Perizinan Investasi oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*." Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 1, No. 2.

Zamroni, Mohammad. 2024. "*Konsep Kewenangan dalam Perspektif Hukum Perdata*." Mimbar Hukum, Vol. 36, No. 2.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Reformulasi Pengaturan Keberlanjutan Kepengurusan Organisasi Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum
dan Keberlangsungan Fungsi Organisasi**
Herman Budi Leksono, Dr. Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7168).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139).

Peraturan Menteri Hukum Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perkumpulan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 373).

Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 400).

Peraturan Menteri Hukum Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penetapan, Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Notaris. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 416).

D. Dokumen Organisasi

Ikatan Notaris Indonesia. 2005. *Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia: Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia*, Bandung, 27 Januari 2005.

Ikatan Notaris Indonesia. 2006. *Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia: Hasil Kongres XIX Ikatan Notaris Indonesia*, Jakarta, 27–28 Januari 2006.

Ikatan Notaris Indonesia. 2015. *Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia: Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia*, Banten, 29–30 Mei 2015.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Reformulasi Pengaturan Keberlanjutan Kepengurusan Organisasi Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum
dan Keberlangsungan Fungsi Organisasi**
Herman Budi Leksono, Dr. Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Ikatan Notaris Indonesia. 2015. *Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia: Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas*, Banten, 30 Mei 2015.

Ikatan Notaris Indonesia. 2015. *Perubahan Kode Etik Notaris*: Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29–30 Mei 2015.

Ikatan Notaris Indonesia. 2017. *Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia*: Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas, Balikpapan, 12 Januari 2017.

Ikatan Notaris Indonesia. 2018. *Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia: Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas (Pra-Kongres),* Yogyakarta, 19–20 Oktober 2018.

E. Lain-lain

Department of the Prime Minister and Cabinet Australia. 2024. *Guidance on Caretaker Conventions*. Canberra.

Kementerian Hukum Republik Indonesia. 2022. *Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.UM.01.01-1656 tanggal 29 Desember 2022 perihal Pelaksanaan Kongres Ikatan Notaris Indonesia.* Jakarta.

Kementerian Hukum Republik Indonesia. 2023. *Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.UM.01.01-133 tanggal 24 Februari 2023 perihal Pelaksanaan Kongres Ikatan Notaris Indonesia*. Jakarta.

Kementerian Hukum Republik Indonesia. 2023. *Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.UM.01.01-147 tanggal 3 Maret 2023 perihal Penundaan Pelaksanaan Kongres Ikatan Notaris Indonesia.* Jakarta.

Kementerian Hukum Republik Indonesia. 2024. *Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.20-37 Tahun 2024 tentang Kebijakan Pemenuhan Syarat Permohonan Pengangkatan, Perpindahan Wilayah Jabatan Notaris, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.* Jakarta.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 009-014/PUU-III/2005*.

Oireachtas Library & Research Service. 2021. *Caretaker Governments and Caretaker Conventions*. Dublin.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Reformulasi Pengaturan Keberlanjutan Kepengurusan Organisasi Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum
dan Keberlangsungan Fungsi Organisasi**
Herman Budi Leksono, Dr. Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Surat Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 72/22-III/PP-INI/2023 tanggal 29 Maret 2023 perihal Pelaksanaan Kongres XXIV Ikatan Notaris Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2023. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan 24 Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia. Jakarta: DPR RI.

El Maulyda, Sabiela. "Analisis Hukum terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Dualisme Kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2023", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2025.

Rizani, Raisa. "Penyelesaian Sengketa dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia tentang Pemilihan Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia Periode 2016–2019 oleh Mahkamah Perkumpulan", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2018.

Puspa, Nesia Weroza. "Pembatalan Keputusan Kongres IPPAT Ke VII Tahun 2018 di Makassar Akibat Kecurangan dalam Pemilihan Ketua Umum IPPAT (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 422/PDT/2020/PT.DKI)", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2021.